

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DIBALIK PRESTASI AKUNTABILITAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Kalapie Astragina

Universitas Negeri Surabaya

kalapieka@yahoo.com

### ***Abstract***

*Indonesian government published regulation UU No. 15 on 2004 to respond the demand of the citizen about transparency of financial governance to realizing the good governance concept. But, until now the percentage of provincial government's financial report which can get Unqualified Opinion from BPK just 33%, it means that accountability of the provincial government's financial still at the low rate. East Java Provincial Government has a good achievement for the audit opinion, the financial report can get Unqualified Opinion for the last three yaers since 2010. Considering this phenomena, the researcher would like to find out the factors behind East Java Provincial's achievement. The results are the substitution of the governor, success rate of the main program which can make the economy rate of the East Java grow, harmonious coordination between the local government and BPK, participation of the citizen, the obedience with the regulation, and improvement of the information's quality and technology.*

**Keywords :** *Good governance, accountability, financial report, audit opinion.*

### **PENDAHULUAN**

Sejak era orde baru berakhir, tuntutan masyarakat atas pemerintahan yang bersih, dan transparan semakin kuat. Untuk menyikapi tuntutan masyarakat tersebut, seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat eksekutif, legislatif, hingga yudikatif harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mewujudkan *good governance* yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dimana peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambanya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 tahun 2005) (Tanjung, 2008). Semua paket perundang-undangan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*.

*Governance* sering diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, sedangkan *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan (tata kelola pemerintah) yang baik. Pengertian *good governance* menurut Bank Dunia yang dikutip oleh Mulyawan (2009) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Di dalam modul Universitas Sumatera Utara, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan United Nation Development Program (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara. Salah satu karakteristik *good governance*

menurut UNDP adalah *accountability* yang artinya pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Praktik pemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik. Keterbukaan dan integritas yang mencakup dua hal pokok yaitu kejujuran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan publik, serta akuntabilitas merupakan tiga prinsip *good governance* menurut UNDP.

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wakhyudi (2006), ketiga prinsip *good governance* tersebut tergambar jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, hingga pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan aturan yang tertera dalam paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang telah disusun oleh pemerintah untuk menyikapi tuntutan masyarakat. Implementasi akuntabilitas di Indonesia semakin kuat sejak era reformasi, hal ini menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap transparansi organisasi-organisasi pemerintahan meningkat.

Dalam modul Universitas Sumatera Utara, akuntabilitas dapat diartikan sebagai keterbukaan atau bentuk pertanggungjawaban dari penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Teguh (2008), Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Tingkat akuntabilitas salah satunya dapat dilihat dari opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tolak ukur kewajaran penyajian laporan keuangan instansi pemerintahan sebagai bentuk transparansi keuangan dan pertanggungjawaban instansi kepada masyarakat sebagai *stakeholder*.

Sejak paket perundang-undangan tentang akuntabilitas diberlakukan, hingga saat ini masih sedikit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tingkat Provinsi yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK hanya 10 LKPD Provinsi yang berhasil memperoleh opini WTP, fakta ini menunjukkan masih rendahnya tingkat akuntabilitas di tingkat Pemerintah Provinsi. Ini merupakan fakta yang memprihatinkan, mengingat dana yang dikelola oleh pemerintah adalah dana publik. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan mereka dengan menerapkan akuntansi menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang prestasi akuntabilitasnya layak dijadikan contoh, LKPD Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan opini audit BPK yang signifikan sejak Tahun Anggaran 2008 hingga berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tiga tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2010. Selain itu Pemprov Jatim juga berhasil

memperoleh nilai “B” untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012. Pemprov Jatim juga berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang paling inklusif, fakta ini sesuai dengan hasil penelitian Bank Dunia (1999) yang dikutip oleh Wakhyudi (2006), yang disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara praktik pemerintahan yang baik dengan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik.

Hal menarik dari penelitian ini adalah bagaimana Pemprov Jatim berhasil memperoleh banyak prestasi dalam hal akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik sedangkan banyak Pemprov lain yang belum berhasil memperoleh opini WTP dari BPK. Peneliti ingin mengangkat prestasi yang berhasil diraih oleh Pemprov Jatim dalam hal opini audit, akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik serta faktor-faktor apa yang melatarbelakangi kesuksesan yang diraih Pemprov Jatim tersebut sehingga dapat menjadi contoh baik dan acuan bagi Pemprov lain untuk dapat berprestasi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana pembahasan hal-hal yang diangkat oleh penulis diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi *file* Pemprov Jawa Timur dan BPK serta penelitian terdahulu tentang akuntabilitas Pemprov Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan acuan bagi pemerintah daerah lain untuk meningkatkan prestasi akuntabilitasnya dalam rangka mewujudkan *good governance* dari tahun ke tahun agar dapat sebaik atau bahkan melebihi prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## **PEMBAHASAN**

Dengan konsep *good governance*, akuntabilitas pemerintah daerah merupakan hal sangat penting karena merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan transparan. Dengan demikian sejauh mana tingkat pengungkapan kinerja pemerintah daerah sebagai akuntabilitas pemerintah menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan pemerintahan daerah.

### **Dasar Hukum**

Berakhirnya masa pemerintahan orde baru merupakan masa dimana tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas instansi-instansi pemerintahan sangat kuat. Menanggapi hal tersebut pemerintah dan DPR telah menunjukkan keseriusan dalam hal akuntabilitas organisasi sektor publik untuk mewujudkan *Good Governance* dengan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tuntutan agar keuangan negara dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan standar untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maka pemerintah terus memperbarui peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang bagi masyarakat akuntansi PP ini dianggap sebagai tonggak sejarah karena sebelumnya sektor pemerintahan belum mempunyai standar akuntansi sejak Indonesia merdeka. Pemerintah juga menetapkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan itu diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

### **Pencatatan Akuntansi dan Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK**

Tingkat akuntabilitas suatu instansi dapat diukur dari Laporan Hasil Audit (LHP) atas LKPD yang dikeluarkan oleh BPK, dimana di dalamnya terdapat opini audit yang menggambarkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan suatu instansi. Berdasarkan UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, setiap laporan keuangan organisasi sektor publik harus dievaluasi oleh BPK untuk mendapatkan opini audit atas tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan instansi terkait.

Gubernur sebagai kepala daerah wajib menyerahkan LKPD yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan lainnya selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK harus menyelesaikan pelaksanaan audit LKPD paling lama tiga bulan setelah Gubernur menyerahkan LKPD.

### **Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Opini audit BPK RI terdiri dari lima opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor, Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian, Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan Tidak Memberikan Pendapat/*Disclaimer opinion* (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2012).

**Gambar 2.1**  
**Opini LKPD Tahun 2006 s.d 2011 pada Pemerintah Provinsi**

Tahun LK	Opini								Jumlah	
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%		
2006	0	0%	25	76%	4	12%	4	12%	33	100%
2007	1	3%	21	64%	3	9%	8	24%	33	100%
2008	0	0%	24	73%	1	3%	8	24%	33	100%
2009	1	3%	24	73%	3	9%	5	15%	33	100%
2010 (Sem I) *)	6	22%	20	71%	0	0%	2	7%	28	100%
2010**) )	6	18%	22	67%	0	0%	5	15%	33	100%
2011 (Sem I)***)	10	36%	16	57%	0	0%	2	7%	28	100%

\*) LK pemerintah provinsi Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2011

\*\*) LK pemerintah provinsi Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I dan II Tahun 2011

\*\*\*) LK pemerintah provinsi Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012

Sumber : Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, 2012.

Berdasarkan IHPS Semester I Tahun 2012, Opini audit untuk LKPD Pemerintah Provinsi mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, namun presentase perolehan opini WTP untuk LKPD Tahun 2011 masih 36%, 57% memperoleh opini WDP, dan 7% auditor menolak memberikan pendapat (TMP). Dengan pencapaian di atas, hanya 10 Pemerintah Provinsi yang berhasil memperoleh opini WTP. Hal ini menggambarkan rendahnya tingkat akuntabilitas di tingkat Pemerintah Provinsi.

Fakta masih rendahnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian ini menunjukkan masih rendahnya keterbukaan terhadap masyarakat selaku *stakeholder*, integritas dan kinerja dari pemerintah juga masih dipertanyakan, serta akuntabilitas yang belum bisa dikatakan akuntabel. Hasil ini berbanding terbalik dengan paket peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas yang mengharuskan setiap instansi pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang wajar dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

Pada intinya semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menyikapi tuntutan masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance*. Namun, sejak diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut, belum ada kemajuan yang signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Pemprov Jatim merupakan contoh yang positif bagi Pemprov lain yang sebagian besar masih memperoleh opini WDP, karena dalam hal ini LKPD Provinsi Jawa Timur 3 Tahun terakhir mampu menembus opini WTP, meski masih dengan paragraf penjas.

## **Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Pada Tahun Anggaran 2007, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jatim per 31 Desember 2007 mendapat opini BPK Tidak Wajar dengan berbagai macam temuan kecurangan yang tidak disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material (Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008).

Berdasarkan data BPK Provinsi Jawa Timur, Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan opini BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2008, dimana pemprov berhasil memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dimana hasil pemeriksaan LKPD TA 2008 di lingkungan Provinsi Jawa Timur ini terdapat 851 temuan pemeriksaan yang terdiri dari 684 temuan administratif; 53 temuan yang berindikasi kerugian senilai Rp20.139.490.617,08; 30 temuan yang berindikasi pemborosan senilai Rp8.542.526.253,21; dan 84 temuan yang berindikasi kekurangan penerimaan daerah senilai Rp56.503.373.111,56.

Pada tahun Anggaran 2009, Pemprov Jatim berhasil mempertahankan opini WDP yang berhasil diperoleh tahun lalu. Dimana dari 39 pemerintah daerah di Jawa Timur (38 pemkab/pemkot dan 1 pemprov), sebanyak 35 pemkab/pemkot dan pemprov Jawa Timur memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Untuk LKPD Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan prestasinya dengan memperoleh opini WTP-DPP untuk pertama kalinya, ini merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat pada tahun 2010 hanya ada 6 provinsi yang memperoleh opini WTP. Prestasi ini mendapat sambutan hangat oleh seluruh masyarakat Jatim. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur DR. Heru Kreshna

Reza yang dituliskan oleh BPK Provinsi Jawa Timur, bahwa atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA. 2010 BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan paragraf penjelasan. Hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya:

1. Terdapat aset berupa tanah yang belum bersertifikat;
2. Belum adanya kebijakan akuntansi terkait kriteria dan metode penyusutan aset tetap.

Atas upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim untuk memperbaiki catatan dari BPK pada Tahun Anggaran 2010 tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyajikan dan mengungkapkannya dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2011, BPK RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan paragraf penjelasan karena alasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menetapkan kriteria dan metode penyusutan aset tetap yang akan diberlakukan di seluruh satuan kerja perangkat daerah, sehingga pelaporan aset tetap per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masih disajikan sebesar harga perolehannya. Atas paragraf penjelasan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK RI mengharapkan setelah memperoleh opini WTP dengan paragraf penjelasan, sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai apakah Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yang berkesinambungan melalui realisasi alokasi anggaran yang dimilikinya.

Untuk LKPD Pemprov Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, pemprov jatim masih memperoleh opini yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas. Namun, catatan penjelasnya semakin sedikit dan berkurang dibandingkan tahun lalu sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim Dr Heru Kreshna Reza dalam siaran Pers BPK, bahwa opini WTP yang diterima pemprov Jatim adalah opini WTP tingkat kewajaran penyajian. Namun opini tersebut sudah bisa dikatakan layak masuk areal tata kelola yang akuntabel dan tepat sasaran. Tetapi opini WTP yang diterima Pemprov Jatim masih ada catatan yang harus diselesaikan secara akuntansi yakni penyusutan aktiva tetap. Secara cepat pemprov harus membuat program-program tersebut agar opininya menjadi WTP murni.

Jika disimpulkan maka pencapaian opini audit LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 6 tahun terakhir terus mengalami peningkatan signifikan terutama pada TA 2008, hingga pada Tahun Anggaran 2012 Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur dapat mengategorikan pencapaian pemprov jatim tersebut dalam area tata kelola yang akuntabel dan tepat sasaran. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dijadikan contoh positif dalam hal akuntabilitas dan kewajaran penyajian laporan keuangan.

Namun dari tahun ke tahun masih ada masalah yang dihadapi pemprov jatim sehingga belum bisa memperoleh opini WTP murni yaitu masalah penyusutan aset tetap dan tanah sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arnitasari (2013) tentang Akuntabilitas Provinsi Jawa Timur dalam Pengelolaan Aset yang menyimpulkan akuntabilitas program

dan akuntabilitas proses Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih kurang akuntabel. Hal tersebut yang menyebabkan Pemprov Jatim belum bisa mendapatkan opini WTP murni seperti yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2012.

**Tabel 2.1**  
**Perolehan Opini LKPD Pemprov Jatim 6 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Opini
1	2007	TW
2	2008	WDP
3	2009	WDP
4	2010	WTP-DPP
5	2011	WTP-DPP
6	2012	WTP-DPP

Sumber : Diolah Penulis

### **Prestasi Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Selain prestasi dalam hal opini audit, Pemprov Jatim juga mendapat beberapa prestasi dalam hal tata kelola yang baik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menempati rangking kedua dalam tata kelola pemerintahan. Sementara urutan tata kelola terbaik nasional diraih oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Data ini diungkapkan *Indonesia Governance Index* (IGI) yang telah melakukan pengukuran empat arena tata kelola pemerintahan yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Keempat arena ini diukur berdasarkan fungsi-fungsi dijalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektivitas.

Tidak hanya itu, berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Jatim

memperoleh nilai 65,48 atau dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011. Bersama lima provinsi lainnya yakni Jawa Tengah (Jateng), DI Yogyakarta, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Ini merupakan prestasi yang membanggakan dimana yang memperoleh Tingkat Akuntabilitas Kinerja A hanya Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan BPK. Ini berarti untuk level Pemerintah Provinsi, dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B, Pemprov Jawa Timur merupakan salah satu dari enam Pemprov yang memperoleh tingkat akuntabilitas kinerja tertinggi dibanding Pemprov yang lainnya.

### **Faktor-faktor Dibalik Prestasi Akuntabilitas Pemprov Jawa Timur**

Dalam mewujudkan prestasi yang telah didapatkannya bukan hal yang mudah bagi Pemprov Jatim, diperlukan kerjasama untuk segala aspek dari semua lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah Jawa Timur. Tentu ada hal-hal yang mendukung prestasi Pemprov Jatim tersebut, yang dapat dijadikan acuan dan contoh untuk Pemerintah Daerah lainnya.

Pertama adalah kesuksesan program utama dan program unggulan dari Pemprov Jatim yang dirancang untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh SekDa Prov Jatim Dr. H. Rasiyo di dalam *website* Pemprov Jatim yang mengingatkan kembali kepada aparat birokrasi bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu program utama Pemprov Jatim yang merupakan unsur penting dalam memperbaiki pandangan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

Kedua adalah kemajuan perekonomian, sebagai tujuan akhir dari kesuksesan program utama Pemprov Jatim yang telah disebutkan di atas. Dengan kerja keras semua jajaran Pemda dan masyarakat, Pemprov Jatim berhasil meningkatkan perekonomian dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Pemprov Jatim, hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan perekonomian Jawa Timur yang mencapai 7,2% pada tahun 2011, angka tersebut di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,5%. Selain itu capaian kinerja Provinsi Jawa Timur juga dapat dilihat dari perolehan besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus meningkat sejak Tahun 2008 hingga mencapai Rp. 895,22 triliun pada tahun 2011, nilai ekspor Provinsi Jawa Timur naik 35,18% pada tahun 2011 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jatim edisi Februari 2012 secara akumulatif, dan juga tingkat pertumbuhan investasi yang juga semakin tinggi. Sehingga secara umum, pencapaian indikator kinerja perekonomian Provinsi Jatim sangat baik, ini merupakan bukti pengelolaan anggaran yang sesuai dengan amanah rakyat.

Ketiga adalah Kepercayaan dan partisipasi masyarakat Jawa Timur dalam menjalankan pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa rakyat adalah pemberi amanah kepada wakil-wakil mereka baik di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga kepercayaan dan dukungan dari masyarakat akan sangat menentukan kinerja pemerintahan khususnya Pemprov Jatim. Jajaran prestasi yang terus diterima oleh Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari peran masyarakat yang percaya kepada pemimpinnya dan berpartisipasi dalam memberikan kritik

yang membangun bagi Pemda Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Soekarwo melalui *website* Pemprov Jatim.

**Gambar 2.2**  
**Tingkat Pertumbuhan Investasi di Jawa Timur**



Sumber : Badan Pengawas Modal provinsi Jawa Timur

Keempat adalah koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua pihak, koordinasi yang baik akan menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik pula. Hal ini lah yang berhasil dicapai oleh Provinsi Jawa Timur, harmonisasi kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam pelaksanaan roda pemerintahan mampu mensejahterakan masyarakat, selain itu opini WTP yang berhasil merupakan bukti pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai amanah rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh Hery Prasetyo selaku anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jatim melalui *website* DPRD Jatim.

Kelima adalah kualitas informasi dan teknologi serta ketaatan pada regulasi. Informasi tentang pemerintahan akan selalu di *update* di situs resmi

Pemprov Jatim [www.jatimprov.go.id](http://www.jatimprov.go.id), sehingga kualitas informasi terjamin dan masyarakat dapat mengikutinya secara *up to date*. Ini merupakan salah satu bentuk pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim sebagai media Pemprov Jatim untuk menerapkan e-government seperti yang tercantum di *website* Pemprov Jatim sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Sedangkan ketaatan pada regulasi sendiri sudah dibuktikan dengan hasil WTP yang diperoleh atas pemeriksaan LKPD Pemprov Jatim.

Keenam adalah pergantian pemimpin. Seperti diungkapkan dalam *website* DPRD Jatim, peningkatan prestasi opini audit BPK atas LKPD Pemprov Jatim yang terlihat sebagai batu loncatan adalah opini TW atas LKPD Tahun Anggaran 2007 menjadi opini WDP atas LKPD Tahun Anggaran 2008, dan selanjutnya terus meningkat hingga berhasil mempertahankan opini WTP selama 3 tahun sejak Tahun Anggaran 2010. Sebagaimana kita tahu pada pertengahan 2008 terjadi pergantian Gubernur Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum memenangi pilkada tahun 2008 dan menjabat sebagai gubernur Jawa Timur hingga saat ini. Sejak itu beliau terus memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan dan pertumbuhan perekonomian Jawa Timur. Pemimpin merupakan penentu dalam pengambil keputusan strategis dalam suatu instansi dan paling menentukan maju dan mundurnya suatu organisasi. Gubernur Soekarwo dapat dikatakan sangat berhasil dalam pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kinerja pengelolaan keuangan Jatim dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang beliau terima dari Presiden dan Pemerintah Pusat selama beliau menjabat gubernur Jawa Timur. Kepala BPK Perwakilan Jatim, Heru Kreshna Reza

mengungkapkan komunikasi audit antara Pemprov Jatim dengan BPK terjalin dengan baik, terutama peran gubernur dalam pengelolaan keuangan.

## SIMPULAN

Tata kelola keuangan yang bersih dan transparan merupakan keinginan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan *good governance*. Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang telah diamanatkan oleh rakyat. LKPD tersebut harus diperiksa oleh BPK sebagai auditor eksternal organisasi-organisasi pemerintahan, untuk menilai apakah LKPD yang telah disusun oleh Pemda tersebut telah disajikan secara wajar, *reliable*, dan akuntabel,. Hasil dari pemeriksaan LKPD tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi opini audit dan hasil pemeriksaan.

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki prestasi dalam hal akuntabilitas yang patut dijadikan contoh. Opini audit yang diperoleh oleh Pemprov Jatim terus mengalami peningkatan pada 6 tahun terakhir, dimulai dari LKPD TA 2007 yang mendapat opini Tidak Wajar, Pemprov Jatim memperbaikinya hingga mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKPD TA 2008 dan 2009 serta Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas untuk LKPD TA 2010, 2011, dan 2012. Tidak hanya prestasi dalam opini audit tersebut, Pemprov Jatim juga banyak menerima penghargaan-penghargaan lainnya, seperti piala dan trofi Citra Bhakti Abdi Negara 2012 yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN

dan RB) sebagai *reward* atas kinerja pemprov Jatim bersama SKPD yang mendapatkan penilaian sangat akuntabel.

2. Faktor-faktor yang ada dibalik kesuksesan Pemprov Jawa Timur dalam meraih prestasi-prestasi dan penghargaan-penghargaan tersebut adalah keberhasilan program-program utama dan unggulan yang ditetapkan oleh Gubernur Soekarwo sehingga perekonomian di Jawa Timur mengalami perkembangan karena keberhasilan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan nilai ekspor. Selain itu, prestasi tersebut dapat diarahkan berkat kerjasama, koordinasi yang harmonis antara semua jajaran Pemda, Dewan Legislatif Daerah, dan BPK dalam menjalankan roda pemerintahan, serta dukungan dan kepercayaan masyarakat Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur juga terus meningkatkan kualitas informasi dan teknologi serta menunjukkan ketaatannya terhadap regulasi yang berlaku.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi Pemprov Jatim, Pemprov secara keseluruhan dan bagi peneliti selanjutnya adalah :

1. Bagi Pemprov Jatim untuk lebih memperbaiki opini audit atas LKPD dengan memperbaiki paragraf penjelas yang dikeluarkan oleh BPK sehingga dapat mendapat opini WTP murni, seperti tentang masalah tanah. menurut Arnitasari (2013) dalam penelitiannya, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas proses, dalam akuntabilitas proses BPKAD selaku pelaksana yang menangani masalah sertifikasi aset

tanah juga dikatakan kurang akuntabel. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan para aparat dalam mengetahui letak dan posisi aset tanah tersebut, sehingga memakan waktu lama dalam proses pemetaan dan juga kurangnya koordinasi dengan BPN, sehingga dapat dikatakan BPKAD lemah dalam hal negosiasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena rendahnya LKPD yang mendapat opini WTP, khususnya bagi daerah krusial seperti Pemprov Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi*, Cetakan kedua. Alfabeta : Bandung
- Anonimous. BAPPENAS. 2003. *Indikator Good Public Governance*. (Diakses 14 Juni 2013). <http://goodgovernance.bappenas.go.id>.
- Arifiyadi, Teguh. Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, [http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel\\_itjen&view=1&id=BRT070511110601](http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT070511110601), Diakses 25 Maret 2013
- Arnitasari, Nindya. (2013). “Kebijakan dan Manajemen Publik”. *Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengelolaan Aset*. Vol I, (1).
- Bappeda Provinsi Jatim. *Ekonomi Jatim Paling Inklusif di Indonesia*. 2012. (Diakses 14 Juni 2013). <http://bappeda.jatimprov.go.id/>
- DPRD Jatim. *Apresiasi BKP-DPRD Jatim untuk Pemprov Jatim*. 2013. (Diakses 14 Juni 2013). <http://dprd.jatimprov.go.id/>
- Gondodiyoto, Sanyoto. 2004. *Materi Laporan Hasil Audit*. Jakarta:Universitas Bina Nusantara
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester I Tahun 2012
- Lalolo Krina P, Loina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi di Indonesia Tahun 2011
- Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa Timur Semester I Tahun Anggaran 2008
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
- Mardiasmo, 2006, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 – 17
- Mulyawan, Budi. 2009. *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang)*. Universitas Sumatera Utara, Skripsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Reynaldi Riantiarno dan Nur Azlina. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)*. *Pekbis Jurnal* Vol. 3, No.3
- Siregar, Silky Raditya. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/AAJ> 1 (2)
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*. Universitas Nasional Pasim.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-undang Nomo 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara
- Wakhyudi. 2009. *Pemberdayaan Peran Audit Internal dalam Mewujudkan Good Governance Pada Sektor Publik*. [www.bpkp.go.id/](http://www.bpkp.go.id/) Diakses 25 Maret 2013
- [www.jatimprov.go.id/](http://www.jatimprov.go.id/)
- [www.menpan.go.id/](http://www.menpan.go.id/)
- [www.surabaya.bpk.go.id/](http://www.surabaya.bpk.go.id/)